



ANGKRINGAN

Buletin BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Prov. D.I. Yogyakarta dari Andri Yogama kepada V.M. Ambar Wahyuni



Pada tanggal 14 Februari 2020 bertempat di Auditorium R. Soerasno telah dilaksanakan acara serah terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Andri Yogama, yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Prov. Bengkulu kepada V.M. Ambar Wahyuni, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Prov. Sumatera Utara. Serah terima ini dihadiri oleh Sekda Prov. DI Yogyakarta, Drs. Kadarmanta Baskara Aji dan Wakil Ketua DPRD, Anton Prabu Semendawai, Bupati Kulon Progo, Sutedjo, Wakil Walikota, Heroe Poerwadi, serta tamu undangan dari Pemerintah Daerah DIY dan para pejabat serta pegawai BPK Perwakilan Prov. DIY.

Hadir dalam serah terima jabatan tersebut adalah Anggota V BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, Auditor Utama Keuangan Negara I, Heru Kreshna Reza, dan Kepala Badan Diklat PKN, Hery Subowo.

Anggota V, Prof. Bahrullah Akbar dalam sambutannya



menyampaikan bahwa serah terima jabatan ini dilakukan untuk menjaga dan membangun budaya organisasi BPK yang berlandaskan Independensi, Integritas dan Profesionalisme dan merupakan salah satu cara untuk menyegarkan lingkungan kerja, mendorong semangat bagi para pejabat. “Serah terima jabatan ini dapat menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta menjalin komunikasi, membangun sinergi dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja sama BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” harapnya. Prof. Bahrullah Akbar menegaskan pula tiga hal penting yang menjadi perhatian yaitu pertama, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan melalui peningkatan efektivitas sistem pengendalian mutu (quality control) dan efektivitas keyakinan mutu (quality assurance) pada tingkat pemeriksaan maupun kelembagaan. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Ketiga, komitmen BPK untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas jenis pemeriksaan kinerja melalui rekomendasinya karena dapat menilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu program, kegiatan, atau pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Gubernur DIY yang diwakili oleh Sekda DIY dalam sambutannya menyampaikan harapannya bahwa pimpinan baru BPK Perwakilan DIY dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Lanjutnya, “Partisipasi aktif BPK untuk membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sangat diharapkan dan BPK Perwakilan DIY telah bekerja secara konsisten dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah untuk menjadi lebih baik.”

Pembekalan Keuangan Negara Anggota V kepada Taruna dan Perwira AAU



Anggota V BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA berkesempatan memberikan Pembekalan dengan judul “Kapita Selekta Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan” bagi Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada Jumat, 14 Februari 2020 di Gedung Sabang Merauke. Pembekalan ini dihadiri pula oleh Gubernur AAU, Marsekal Muda TNI Nanang Santoso, perwira, dosen serta seluruh staf AAU. Hadir dari BPK yaitu Auditor Utama Keuangan Negara I, Heru Kreshna Reza, Kepala Badiklat PKN, Hery Subowo, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY, V.M. Ambar Wahyuni dan seluruh pejabat BPK Perwakilan DIY dan Balai Diklat DIY.

Dalam sambutan pembukaan pembekalan ini, Gubernur AAU menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Anggota V BPK beserta jajarannya atas kehadirannya dan perkenannya dalam menyampaikan materi pembekalan kepada 681 peserta mengenai keuangan negara karena seluruh taruna/i, perwira serta staf di AAU akan berperan aktif dalam pengelolaan keuangan negara.



Anggota V, Prof. Bahrullah Akbar menyampaikan tiga poin penting yaitu gambaran umum BPK secara keseluruhan dalam tatanan pengelolaan keuangan negara, konsep keuangan negara termasuk tugas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah, dan yang terakhir adalah mengenai aspek “value for money” dalam mengelola keuangan negara untuk pelayanan publik yang bertujuan untuk peningkatan efektivitas, peningkatan mutu, penurunan biaya dan peningkatan alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik.



Hasil Survey Pelayanan Publik Semester 1 Tahun 2019 BPK DIY



Penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah dan Kegiatan Operasional TA 2019



Pada tanggal 22 Januari 2020, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang meliputi LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemda DIY, Kota Yogyakarta, dan Kab. Sleman dan LHP Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah DIY.

Penyerahan LHP ini dilaksanakan di Auditorium dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DIY), Haryadi Suyuti (Walikota Yogyakarta), Sri Purnomo (Bupati Sleman), K. Baskara Aji (Sekretaris Daerah), Huda Tri Yudianta, ST (Ketua DPRD), H. Danang Rudiymoko (Ketua DPRD Kota Yogyakarta), Haris Sugiharta (Ketua DPRD Kab. Sleman), Prof. Ainun Na'im, MBA, Ph.D. (Komisaris PT DIY), Drs. Santoso Rohmad, MM (Direktur PT BPD DIY) serta jajaran terkait lainnya.



Dalam sambutannya, Andri Yogama menyatakan bahwa hasil pemeriksaan belanja daerah ini telah sesuai kriteria Perpres No. 16 Tahun 2018 serta peraturan perundangan lainnya kecuali atas beberapa permasalahan yang disampaikan dalam temuan-temuan di LHP dan diharapkan entitas yang diperiksa dapat memperbaiki kelemahan yang ada, menyatakan secara jelas apa yang harus diperbaiki, serta siapa yang memiliki wewenang untuk menginisiasi perbaikan yang direkomendasikan.

Proses penindaklanjutan rekomendasi ini diserahkan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Gubernur DIY dalam sambutannya mengucapkan terima kasih pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi DIY yang memberikan arahan administratif yang benar terhadap kinerja Pemerintah Daerah agar dicapai peningkatan kinerja dengan kualitas yang lebih baik.

SOSIALISASI PELENGKAP SISTEM INFORMASI BANPARPOL DENGAN KESBANGPOL



12 Maret 2020 bertempat di Gedung BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta, dilaksanakan pertemuan dengan pihak Kesbangpol untuk membahas inovasi terbaru dari BPK terkait system aplikasi pertanggungjawaban laporan keuangan atas bantuan keuangan bagi partai politik. Sistem aplikasi ini merupakan pembaharuan atas aplikasi

terdahulu. Partai politik diberikan wadah dalam aplikasi tersebut untuk dapat langsung meng-input SPJ sehingga pada akhir tahun laporan pertanggungjawaban segera diperoleh dengan tepat waktu oleh pemeriksa BPK dan dapat segera dilakukan pemeriksaannya. Acara ini merupakan informasi awal untuk mengundang seluruh pimpinan DPC Parpol dan Kesbangpol pada tanggal 19 Maret 2020 dalam rangka Mensosialisasikan penerapan aplikasi ini dengan menghadirkan Kepala Biro TI BPK RI, namun acara tersebut ditangguhkan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut, mengingat adanya pandemi COVID-19.



PENYERAHAN LHP LKPD TA. 2019 PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN KULON PROGO



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo.

Penyerahan LHP LKPD Tahun 2019 ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ini, dikarenakan adanya wabah Corona Virus disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemik global oleh World Health Organization (WHO) dan perkembangan terkini penyebaran COVID-19 di Indonesia, serta terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/SE/X-XIII.2/3/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, oleh karena itu penyerahan LHP LKPD Tahun 2019 dilaksanakan secara sederhana yang hanya dihadiri oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan entitas yang pertama kali menerima LHP, yaitu pada hari Selasa, 17 Maret 2020, dilanjutkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo serentak pada tanggal 27 Maret 2020.

Penyerahan LHP tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, V.M.

Ambar Wahyuni kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta; Bupati Sleman Sri Purnomo; Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiymoko; Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti; Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati; Bupati Kulon Progo Sutedjo.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY mengucapkan terima kasih atas komitmen seluruh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih. Selanjutnya agar pejabat dalam jajaran Pemerintah Daerah diatas wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Pada kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bupati Sleman, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, dan Bupati Kulon Progo mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang untuk semakin transparan dan akuntabel.

FILM BUDAYA KERJA : Integritas



Akhirnya, pada tanggal 3 Maret 2020 diluncurkan film BPK serial I dari Trilogi Film yang direncanakan mengenai Nilai Budaya Kerja, yaitu : Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Trilogi pertama ini berjudul integritas yang bertujuan untuk mengingatkan bagi para pelaksana BPK untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja BPK yang juga merupakan kode etik bagi seluruh pelaksana di BPK.



Langkah Mencegah Penularan Virus Corona:

Empon-empon Jamu Penangkal Virus Corona (Covid-19)



1. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
2. Menggunakan masker
3. Menjaga daya tahan tubuh

4. physical distancing; menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain
5. Menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus
6. Berjemur di bawah sinar matahari juga dapat mencegah infeksi virus Corona



JAHE HANGAT



BERAS KENCUR



KUNYIT ASAM

Galeri Foto WFH (Work From Home)



DARI ECC UNTUK SABABAT WFH BPK
TETAP TERHUBUNG
 Strategi Koping Untuk Tetap Sehat

Ujian kondisi seseorang physical diadaring di masa pandemi ini, tetap terhubung secara sosial menjadi sebuah dukungan bagi kita dan diri kita untuk orang lain.

Terdapat beberapa jenis interaksi dengan keluarga, teman, rekan kerja dan juga kondisi yang memiliki risiko, baik fisik untuk keluarga atau COVID-19 merupakan suatu hal yang penting.

Sebelum beres beres, mungkin harus mempersiapkan diri, atau berlama lama di rumah maka dapat muncul kecemasan, stress, bahkan depresi, karena perubahan interaksi yaitu kontak dan komunikasi secara daring atau melalui telepon dan media komunikasi lainnya, kita dan orang yang kita hubungi akan merasa rasa cemas dan dapat muncul perasaan sedih, marah, dan dilain. Perasaan-perasaan tersebut merupakan kekhawatiran yang baik bagi kesehatan tubuh kita.

Isolasi sosial yaitu hubungan-mengurangi sosial yang dimana yang mengurangi hubungan antara orang-orang yang tinggal di rumah atau di tempat-tempat, atau kelompok dengan kelompok. (Sawardi Sukawati)

Memastikan kondisi sosial, informasi yang ada yang dapat diakses oleh masyarakat yang dapat memberikan kenyamanan atau beres-beresnya. (Gustika)

The telephone give us happiness of being together yet safely apart. (Nancy Cadey)



Neng Omah Wae!
Rasah Lungu-lungu Sik!
Sabar ...

BPK JUGA TANGGAP CORONA

Ben Ra Keno Virus Corona

Nyegah Nulare Virus Corona

Ora Nyusahno Tenaga Medis

Luwih Cedhak Karo Keluarga

REDAKSI ANGKRINGAN

Pengarah : V.M. Ambar Wahyuni
Penanggungjawab : Ari Wibowo
Pemimpin redaksi : Ester Arie Noerachmawati
Tim Redaksi : Betani A., Ferianto, Wahyu Bagus Dwiartanto
Alamat : BPK Perwakilan Provinsi DIY (JI.HOS Cokroaminoto 52 Yogyakarta)
Website : Yogyakarta.bpk.go.id
Email : humastu.yogyakarta@bpk.go.id

Hasil Survey Pelayanan Publik Semester 1 Tahun 2019 BPK DIY

Terdapat Praktik Pencaloan/Perantara/Biro Jasa

Layanan Sesuai Dengan Yang Diinformasikan

Kemudahan Prosedur Pelayanan

Respon Pelayanan Dapat Diakses

Layanan Dapat Diakses

PELAKSANAAN WAKTU PELAYANAN SESUAI DENGAN YANG DIINFORMASIKAN